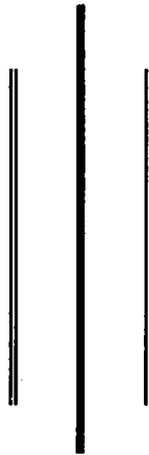




NOTA KEUANGAN

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2009**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Handwritten signature and date: 29/03

BAB I

P E N D A H U L U A N

Kondisi Umum

Sesuai dengan siklus tahunan keuangan daerah, Perubahan APBD merupakan mekanisme yang penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mengakselerasikan pembangunan daerah dan kebijakan-kebijakan yang berkembang baik kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah serta perkembangan kemampuan fiskal daerah pada tahun anggaran berjalan. Faktor-faktor tersebut yang tentunya perlu ditelaah secara seksama untuk dilaksanakan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2009.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah menggarisbawahi bahwa Perubahan APBD dilakukan harus memperhatikan beberapa kriteria, diantaranya :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
4. Keadaan darurat
5. Keadaan luar biasa

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009, dalam perjalanannya mengalami dinamika perubahan yang cukup kuat, dari sisi fiskal pendapatan dan belanja daerah perlu penyesuaian kembali, selain itu kebijakan pemerintah yang berkembang saat ini juga perlu kita cermati bersama. Krisis ekonomi Global yang ditandai dengan lesunya perekonomian dunia akan sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia khususnya yang melakukan hubungan ekonomi dengan negara-negara Amerika dan Eropa, setidaknya permintaan pasar luar negeri terhadap ekspor Indonesia berkurang, menurut datanya turun hingga 50%. Dampak dari penurunan ekspor antara lain kegiatan produksi akan terganggu dan sebagian unit produksi akan dihentikan beroperasi, industri pengolahan akan mengurangi membeli sebagian bahan baku dari *supplier* termasuk petani dan nelayan, sebagian karyawan pabrik di PHK, sebagian *supplier* akan kehilangan bisnis mereka dan tidak ada kegiatan, pendapatan pekerja akan berkurang atau tidak memiliki pendapatan, banyak pelaku bisnis melakukan penangguhan pembayaran pajak dan sebagian juga sudah tidak punya kemampuan untuk membayar pajak mereka, maka dapat diprediksi bahwa penerimaan negara dari sektor pajak akan berkurang dan akhirnya kemampuan keuangan serta anggaran negara juga akan berkurang, konsekwensinya bagi pemerintah daerah dengan pendanaan APBD kita yang kurang lebih 90 % dari Pemerintah Pusat juga ikut terpengaruh. Krisis yang dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian Indonesia, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan stimulus melalui program-program yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi sektor riil, pelaku usaha dan masyarakat secara langsung. Untuk mendukung tingkat pertumbuhan

perekonomian pemerintah melakukan kebijakan Stimulus fiskal, diberikan dalam bentuk penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dan Perorangan, Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Masuk. Untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan melalui program Stimulus tambahan ekonomi tahun 2009 ini antara lain : pertama, mewujudkan penguatan pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah melalui Kredit Usaha Rakyat. kedua, peningkatan daya saing sektor riil atau industri terpilih. Ketiga, pembangunan infrastruktur padat karya. Program perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan serta perbaikan kesejahteraan masyarakat diberikan dalam bentuk perbaikan akses dan kualitas pendidikan, jaminan kesehatan masyarakat, program keluarga harapan, dan bantuan langsung tunai. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam upaya mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi dampak PHK melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Untuk kondisi ekonomi makro, memasuki tahun 2009, perekonomian global ditandai masih terasa dengan meluasnya dampak dari krisis yang terjadi di Amerika dan Eropa. Dampak krisis tersebut mempengaruhi potensi pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Sebagai upaya untuk menanggulangi dampak yang lebih dalam terhadap penurunan perekonomian. Pelemahan ekonomi global diperkirakan juga berdampak pada perkembangan ekonomi nasional tahun 2009, terutama pada penurunan perkiraan pertumbuhan neraca perdagangan Indonesia dan investasi, sementara konsumsi domestik diperkirakan masih cukup kuat.

Bank Indonesia (*BI rate*) menurun. Dalam tahun 2009, suku bunga *BI rate* diperkirakan mencapai kisaran 7,5 persen. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk tetap menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sementara itu, harga minyak mentah realisasi di akhir tahun 2008 cukup tinggi US\$ 96,8 diperkirakan masih akan tetap tinggi dan berangsur menurun US\$ 80 pada tahun 2009.

Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian terkini, baik global maupun domestik, asumsi makro dalam APBN Tahun 2009 disesuaikan menjadi sebagai berikut : tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula diasumsikan sebesar 6,4 persen disesuaikan menjadi sebesar 6,0 persen; laju inflasi yang sebelumnya diasumsikan sebesar 6,5 persen disesuaikan menjadi sebesar 6,2 persen; rata-rata nilai tukar rupiah tetap sama dengan perkiraan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 9.400,00 per US\$; rata-rata suku bunga SBI 3 bulan sebesar 7,5 persen sama dengan asumsi sebelumnya; rata-rata harga minyak mentah ICP menjadi sebesar US\$80 per barel dari sebelumnya US\$95 per barel; dan volume *lifting* disesuaikan dari 1,034 juta barel per hari menjadi 0,927 juta barel per hari. Perkembangan indikator-indikator ekonomi makro tersebut dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Perkembangan Kondisi Ekonomi Makro
Pemerintah Indonesia

Indikator	2008 (realisasi)	APBN	APBN - P
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2	6,0	4,5
Tingkat Inflasi (%)	11,1	6,2	6,0
Suku Bunga SBI 3 bulan (%)	9,3	7,5	7,5

Dengan melihat beberapa faktor asumsi dasar pencapaian ekonomi makro dan perekonomian nasional, maka Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 ditetapkan bahwa Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 968.705.872.062,00 Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 1.022.541.377.709,25 sehingga defisit yang terjadi adalah sebesar Rp. 53.835.505.647,25. Dari defisit yang terjadi tersebut telah dialokasikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 81.977.088.847,25 dan Pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan sebesar Rp. 28.141.583.200,00.

Tabel I.2
Perkembangan APBD 2009 setelah perubahan

Uraian	APBD	Perubahan APBD	%
Pendapatan	856.326.113.982,00	968.705.872.062,00	13,12
Belanja Daerah	902.049.976.531,00	1.022.541.377.709,25	13,36
Surplus / Defisit	(45.723.862.549,00)	(53.835.505.647,25)	17,74
Penerimaan Pembiayaan	74.219.809.900,00	81.977.088.847,25	10,45
Pengeluaran Pembiayaan	28.141.583.200,00	28.141.583.200,00	0
Pembiayaan Netto	46.078.226.700,00	53.835.505.647,25	16,84
Silpa Berjalan	354.364.151,00	0,00	0

Disamping tekanan faktor eksternal diatas, beberapa kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perubahan APBD Kabupaten Lamongan diantaranya, *Pertama*, masuknya dana-dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan antara lain Dana Tambahan Penyesuaian Tunjangan Fungsional Kependidikan, Dana Alokasi Cukai dan Dana Penyesuaian Percepatan Pembangunan Daerah serta Bantuan dari Pemerintah Propinsi yang sudah diarahkan antara lain untuk Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana Jalan, Pembangunan Jembatan, dan lain-lain. *Kedua*, Penggunaan

Dana Cadangan yang akan digunakan pada perubahan APBD tahun 2009, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pencabutan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 7 tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan. *Ketiga*, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2008, ternyata lebih rendah dari yang ditargetkan pada tahun 2009 sehingga perlu dikoreksi. *Keempat*, Terjadinya pergeseran-pergeseran anggaran yang diusulkan oleh SKPD dan perlu dirumuskan didalam Perubahan APBD.

Kita menyadari bahwa penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 menghadapi kapasitas fiskal yang kurang mengembirakan, disisi lain kita dihadapkan sejumlah kebijakan yang harus dilaksanakan di tahun 2009 ini.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Perubahan APBD

Maksud dan Tujuan penyusunan Nota Keuangan ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran kuantitatif dan kualitatif secara keseluruhan perubahan komponen-komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Defisit yang terjadi serta Kebijakan Pembiayaan ;
2. Menjabarkan terhadap perumusan sasaran kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi yang terkandung dalam rencana strategi Kabupaten Lamongan ;

-
- dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

-
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 11/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 3/E) ;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 2/E);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 5/E) ;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 7/E) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009.
37. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2009.
38. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009.

Sistematika Penulisan Nota Perubahan APBD

Penyusunan Nota Keuangan merupakan penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif yang memaparkan garis-garis kebijakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009. Adapun kerangka penulisannya disusun sebagai berikut :

1. Bab I menjelaskan mengenai latar belakang kondisi yang terjadi ditengah penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2009 dan melihat asumsi dasar perkiraan perkembangan ekonomi di Tahun anggaran berjalan sehingga dapat tersusunnya Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009.

2. Bab II menjelaskan mengenai kondisi perkembangan pendapatan selama kurun anggaran berjalan. Pada bab ini diuraikan mengenai perkembangan kebijakan pendapatan daerah dan berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap masing-masing unsur dalam setiap komponen APBD. Pada Bab ini juga diuraikan kebijakan pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2009, sebab – sebab kenaikan dan penjelasan secara kuantitatif dari target yang diproyeksikan.
3. Bab III menjelaskan mengenai kondisi perkembangan belanja selama kurun anggaran berjalan. Pada bab ini diuraikan mengenai perkembangan umum belanja daerah dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masing-masing unsur dalam setiap komponen APBD. Pada bab ini juga diuraikan kebijakan belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2009, serta latar belakang pengalokasian belanja daerah.
4. Bab IV menjelaskan mengenai perkembangan umum dan arah kebijakan pembiayaan daerah sebagai implikasi dari target Pendapatan yang ditetapkan dan alokasi kebutuhan belanja daerah.
5. Bab V merupakan penutup dari keseluruhan uraian.

BAB II
KONDISI DAN KEBIJAKAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

KONDISI UMUM PENDAPATAN DAERAH

Aspek terpenting untuk memenuhi pelaksanaan Perubahan APBD adalah ketersediaan Pendapatan Daerah dalam mendukung kebutuhan yang digariskan dalam kebijakan umum APBD Perubahan. Untuk memenuhi dan menjamin ketersediaan dana, maka Pendapatan Daerah harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga mampu menjadi instrumen untuk memenuhi kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Dengan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian realisasi target Pendapatan Daerah Tahun 2008 serta memantau kinerja realisasi pada anggaran berjalan. Dari hasil pemantauan untuk tingkat realisasi selama semester pertama pelaksanaan Pendapatan Daerah, menunjukkan adanya pergerakan yang konstan dan namun secara keseluruhan masih dibawah target 50 %. Secara keseluruhan Pendapatan Daerah memasuki semester pertama (tanggal 24 Juni 2009) mencapai tingkat realisasi 44,31 %. Penelusuran data juga menunjukkan secara rata-rata komponen Pendapatan daerah masih terealisasi dibawah 50 %. Untuk Pendapatan Asli Daerah tingkat realisasi mencapai 44,66 %, Dana Perimbangan mencapai realisasi 43,34 % dan kemudian untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 61,03 %. Pencapaian realisasi dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah, dapat dilihat pada Tabel II.1 dibawah ini :

Tabel II.1
Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah
Semester I Tahun 2009

Uraian	Target	Realisasi	%
PAD	66.155.612.200,00	29.542.987.776,27	44,66%
Dana Perimbangan	748.057.196.717,00	324.185.900.594,00	43,34%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	42.113.305.065,00	25.703.659.920,00	61,03%
Pendapatan Daerah	856.326.113.982,00	379.432.548.290,27	44,31%

Karena tidak adanya kebijakan baru dibidang Pendapatan Daerah seperti kenaikan tarif dan insentif yang fundamental, maka pencapaian kinerja tingkat realisasi Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah masih dititikberatkan pada upaya-upaya intensifikasi.

Untuk Pendapatan Asli Daerah mencapai kinerja sebesar 44,66%. Komponen terbesar dalam pencapaian realisasinya dicapai oleh komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan kinerja realisasi sebesar 55,00%, disusul kemudian oleh Retribusi Daerah 47,84%, Pajak Daerah 46,39% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 31,70%.

Dari Dana Perimbangan secara kuantitatif realisasinya telah mencapai sebesar 43,34%. Pencapaian realisasi Dana Perimbangan bersifat kontinue dan teratur, seperti Dana Alokasi Umum didalam semester pertama mencapai 50 %. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus disesuaikan dengan daya serap pengelola kegiatan yang bersumber dari dana tersebut. Dana Alokasi Khusus masih mencapai tingkat realisasi 30,06 %. Kemudian untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak sifat tingkat realisasinya tidak menentu bahkan ada kecenderungan adanya ketidakpastian, karena menyesuaikan

tingkat realisasi dari Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi makro nasional. Untuk Penerimaan Bagi Hasil Pajak mencapai realisasi 8,65 % dan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak realisasinya 32,04 %.

Untuk Lain-Lain Pendapatan Yang Sah selama semester pertama realisasinya mencapai 61,03%. Komponen dari penerimaan ini berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi mencapai realisasi 28,83%, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus realisasinya mencapai 224%.

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH PADA RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2009

Sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009, sejalan dengan kondisi umum dan permasalahan di Bidang Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka dalam menentukan Arah dan Kebijakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Upaya intensifikasi Pendapatan Asli Daerah akan tetap ditingkatkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi di masyarakat. Beberapa kondisi yang mempengaruhi tingkat *ability to pay* dari masyarakat adalah tingkat konsumsi dan tingkat inflasi yang mulai merangkak naik akibat imbas dari kebijakan kenaikan BBM.
2. Penyesuaian terhadap ketetapan dari komponen Dana Perimbangan yang sudah teralokasikan kedalam pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

3. Guna menciptakan Pendapatan Asli Daerah yang sehat dan sesuai kondisi obyeknya serta juga memperhatikan evaluasi selama Semester I, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuain dari target yang ditentukan.

ESTIMASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Dengan melihat tingkat realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 dan tingkat realisasi selama anggaran berjalan, proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ditetapkan sebesar Rp. 856.326.113.982,00. Target tersebut dalam Rancangan Perubahan ini direncanakan sebesar Rp. 968.705.872.062,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 112.379.758.080,00 atau naik 13,12%. Untuk melihat perkembangan Pendapatan Daerah setelah perubahan dapat dilihat Tabel II.2 dibawah ini.

Tabel II.2
Target Pendapatan Daerah setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2009

No	Uraian	Target APBD	Target APBD - P	Bertambah Berkurang	%
1	Pendapatan Asli Daerah	66.155.612.200,00	111.242.158.395,00	45.086.546.195,00	68,15%
2	Dana Perimbangan	748.057.196.717,00	735.106.591.717,00	(12.950.605.000,00)	(1,73)%
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	42.113.305.065,00	122.357.121.950,00	80.243.816.885,00	190,54%
	Pendapatan Daerah	856.326.113.982,00	968.705.872.062,00	112.379.758.080,00	13,12 %

Dibandingkan dengan sebelum perubahan, Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 13,12%. Target tersebut paling besar berasal dari kontribusi komponen-

komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan naik sebesar Rp.80.243.816.885,00. Hal ini terkait dengan adanya alokasi Dana Penyesuaian dan otonomi khusus. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.45.086.546.195,00. Untuk Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp.12.950.605.000,00, hal ini karena menyesuaikan ketetapan dari masing-masing komponen Dana Perimbangan.

Untuk Target Pendapatan menurut Target SKPD dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel II.3
Target Pendapatan daerah setelah perubahan
menurut target SKPD

NO.	SKPD	Target APBD	Target PAK	Bertambah / Berkurang	
				(+/-)	(%)
1	DINAS KESEHATAN	1.535.657.500,00	1.738.664.500,00	203.007.000,00	13,22
2	BADAN PENGELOLA RSD Dr. SOEGIRI	8.177.289.500,00	9.227.395.500,00	1.050.106.000,00	12,84
3	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	149.250.000,00	153.000.000,00	3.750.000,00	2,51
4	DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN	265.000.000,00	195.000.000,00	(70.000.000,00)	-26,42
5	DINAS PU CIPTA KARYA	139.000.000,00	110.500.000,00	(28.500.000,00)	-20,50
6	DINAS PERHUBUNGAN	4.635.943.700,00	4.682.376.500,00	46.432.800,00	1
7	KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN	824.725.000,00	1.225.690.000,00	400.965.000,00	48,62
8	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN	7.084.000.000,00	3.129.000.000,00	(3.955.000.000,00)	-55,83
9	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	503.000.000,00	597.500.000,00	94.500.000,00	18,79
10	SEKRETARIAT DAERAH	858.000.000,00	1.098.000.000,00	240.000.000,00	27,97
11	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	33.500.000,00	33.500.000,00	0	0
12	BADAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH	826.110.931.782,00	892.436.954.062,00	66.326.022.280,00	8,03
13	KECAMATAN DAN KELURAHAN	272.019.000,00	272.019.000,00	0	0
14	KANTOR PERUIJINAN	1.484.100.000,00	1.384.300.000,00	(99.800.000,00)	-6,72
15	KANTOR KETAHANAN PANGAN	35.000.000,00	70.000.000,00	35.000.000,00	100
16	DINAS PERTANIAN DAN PERHUTANAN	242.000.000,00	298.500.000,00	56.500.000,00	23,35
17	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHT HEWAN	148.800.000,00	148.800.000,00	0	0
18	DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN.	1.548.500.000,00	1.628.500.000,00	80.000.000,00	5,17
19	KANTOR PENGELOLAAN PASAR	2.279.397.500,00	50.276.172.500,00	47.996.775.000,00	2105,68
	JUMLAH PENDAPATAN	856.326.113.982,00	968.705.872.062,00	112.379.758.080,00	13,12

Ditinjau dari target SKPD, Kantor Pengelolaan Pasar mengalami kenaikan paling besar yakni Rp.47.996.775.000,00 karena

adanya penjualan Plaza Lamongan dan Pasar Modern, Kantor Ketahanan Pangan target pendapatannya naik Rp.35.000.000,00 dari Penguatan Modal Kelompok Lumbung Pangan tahun 2009, Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan target pendapatannya naik sebesar Rp.400.965.000,00 dari Bea Cetak Akte Capil Akte Kelahiran, Sekretariat Daerah meningkat sebesar Rp.240.000.000,00 dari Kontribusi Pengelolaan Pabrik Pupuk Organik. Untuk besaran kenaikan yang paling besar yakni Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang mengalami kenaikan sebesar Rp.66.326.022.280,00 yang sebagian besar berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Selanjutnya terhadap masing-masing komponen tersebut diuraikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 111.242.158.395,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 45.086.546.195,00 atau naik sebesar 68,15 % dari target semula sebelum perubahan sebesar Rp. 66.155.612.200,00. Untuk melihat perubahan peningkatan PAD tersebut dapat dilihat pada Tabel II.4 dibawah ini :

Tabel II.4
Target Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan Tahun 2009

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
1	Pajak Daerah	14.180.874.000,00	15.165.760.000,00	984.886.000,00	6,95
2	Retribusi Daerah	22.066.974.700,00	23.772.435.500,00	1.705.460.800,00	7,73
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.555.000.000,00	13.087.924.395,00	532.924.395,00	4,24
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.352.763.500,00	59.216.038.500,00	41.863.275.000,00	241,25
	Pendapatan Asli Daerah	66.155.612.200,00	111.242.158.395,00	45.086.546.195,00	68,15

Dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 15.165.760.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 984.886.000,00 atau naik sebesar 6,95% dari target sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar Rp. 14.180.874.000,00, Dari masing-masing komponen Pajak Daerah tersebut, diuraikan secara rinci sebagai berikut :

Tabel II.5
Target Pajak Daerah setelah Perubahan

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
1	Pajak Hotel	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0
2	Pajak Restoran	92.250.000,00	95.250.000,00	3.000.000,00	3,25
3	Pajak Hiburan	294.700.000,00	294.700.000,00	0,00	0
4	Pajak Reklame	665.000.000,00	680.000.000,00	15.000.000,00	2,25
5	Pajak Penerangan Jalan	12.726.674.000,00	13.676.560.000,00	949.886.000,00	7,46
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	210.000.000,00	227.000.000,00	17.000.000,00	8,10
7	Pajak Parkir	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0
8	Pajak Sarang Burung Walet	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0
	PAJAK DAERAH	14.180.874.000,00	15.165.760.000,00	984.886.000,00	6,95

Dari masing-masing komponen Pajak Daerah tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp.111.000.000,00 pada perubahan dianggarkan tetap tidak mengalami perubahan.

Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp. 95.250.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.000.000,00 atau naik 3.25% dari target semula sebelum perubahan sebesar Rp. 92.250.000,00, Kenaikan ini karena adanya momentum bergairahnya sektor jasa khususnya untuk warung dan restoran diharapkan tercapainya target tersebut. Seiring perkembangan

Pariwisata dengan semakin meningkatnya pengunjung WBL terjadi *multiplier effect* yang turut mengairahkan sektor jasa di wilayah sekitar maupun wilayah Kabupaten Lamongan lainnya, khususnya jalur menuju Wisata Bahari Lamongan. Diharapkan para pengusaha warung dan restoran semakin kreatif dalam menyajikan wisata kuliner dengan kekhasan daerah Lamongan yang kaya perikanan, dan kaya budaya kulinernya.

Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp. 294.700.000,00 target ini tetap tidak mengalami perubahan .

Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp. 680.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.15.000.000,00.atau naik 2,26% dari target semula sebelum perubahan sebesar Rp. 665.000.000,00 Kenaikan ini sebagai dampak semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di Lamongan, utamanya pada tempat-tempat dan jalur strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat memasang media informasi yang dengan mudah dapat dikenali masyarakat.

Pajak Penerangan Jalan ditargetkan sebesar Rp.13.676.560.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.949.886.000,00 atau naik 7,46% dari target semula sebelum perubahan sebesar Rp.12.726.674.000,00. Kenaikan ini disesuaikan pemakaian daya konsumsi listrik masyarakat dan pemerintah di kabupaten Lamongan yang diperkirakan mengalami kenaikan.

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditargetkan sebesar Rp.227.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp.17.000.000,00 atau naik 8,10 % dari target semula sebelum perubahan sebesar Rp.210.000.000,00. Kenaikan ini diupayakan melalui intensifikasi pemungutan melalui pengawasan yang ketat dan menjangkau obyek baru sesuai dengan potensi yang ada.

Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp. 26.250.000,00. Target ini tetap tidak mengalami perubahan.

Pajak Sarang Burung ditargetkan sebesar Rp. 55.000.000,00. Target ini tetap tidak mengalami perubahan.

b. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah setelah perubahan ini ditargetkan sebesar Rp. 23.772.435.500,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.705.460.800,00 atau naik sebesar 7,73% dari ketetapan semula sebesar Rp. 22.066.974.700,00. Dari masing-masing komponen Retribusi, diuraikan secara rinci sebagai berikut :

Tabel II.5
Target Retribusi Daerah setelah Perubahan

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
A	Retribusi Jasa Umum	17.050.872.500,00	18.727.450.500,00	1.676.578.000,00	9,83%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.692.947.500,00	10.941.060.500,00	1.248.113.000,00	12,88%
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	30%%
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	824.725.000,00	1.225.690.000,00	400.965.000,00	48,62%
4	Retribusi Pelayanan	4.003.400.000,00	4.055.900.000,00	52.500.000,00	1,31%

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
5	Parkir di tepi jalan umum				
	Retribusi Pelayanan Pasar	1.959.800.000,00	1.959.800.000,00	0	0,00%
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	435.000.000,00	440.000.000,00	5.000.000,00	1,15%
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	35.000.000,00	35.000.000,00	0	0,00%
8	Retribusi Jasa Usaha	2.499.902.200,00	2.627.585.000,00	127.682.800,00	5,11%
1	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	1.417.384.000,00	1.490.634.000,00	73.250.000,00	5,17%
2	Retribusi Tempat Pelelangan	375.500.000,00	375.500.000,00	0,00	0,00%
3	Retribusi Terminal	88.560.000,00	76.492.800,00	(12.067.200,00)	-13,63%
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	125.658.200,00	130.658.200,00	5.000.000,00	3,98%
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00%
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	443.000.000,00	504.500.000,00	61.500.000,00	13,88%
C	Retribusi Perizinan Tertentu	2.516.200.000,00	2.417.400.000,00	(98.800.000,00)	-3,93%
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.030.000.000,00	890.200.000,00	(139.800.000,00)	-13,57%
2	Retribusi Izin Gangguan/Keramalan	213.600.000,00	238.600.000,00	25.000.000,00	11,70%
3	Retribusi Izin Trayek	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00%
4	Retribusi Izin Usaha Perikanan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
5	Retribusi Izin Jasa Usaha Kontruksi (SIJUK)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00%
6	Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00%
7	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00%
8	Retribusi Tanda Daftar Industri (TDI)	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00%
9	Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
10	Retribusi Izin Praktek pelayananan Kesehatan	55.000.000,00	62.500.000,00	7.500.000,00	13,64%
11	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00%
12	Retribusi Izin Penggilinhan Padi, Huller dan Penyosohan beras	17.500.000,00	25.000.000,00	7.500.000,00	42,86%
13	Retribusi Pas Kecil dan Sertifikasi Kesempurnaan Kapal	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	14,29%
14	Retribusi Biaya Penggantian Penggandaan Dokumen	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00%

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
15	Retribusi Izin Eksploitasi Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
16	Retribusi Reklamasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00%
17	Retribusi Izin Usaha Bidang Pariwisata	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
	Retribusi Daerah	22.066.974.700,00	23.772.435.500,00	1.705.460.800,00	7,73 %

Dari masing-masing komponen Retribusi Daerah tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

Dari Jasa Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Perubahan ini ditargetkan sebesar Rp. 10.941.060.500,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.248.113.000,00 atau sebesar 12,88 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 9.692.947.500,00. Kenaikan ini diupayakan melalui target penerimaan dari RSD Dr. Soegiri sebesar Rp. 9.202.396,00 dan target dari Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.738.664.500,00.

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ditargetkan sebesar Rp.70.000.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 30.000.000,00 atau turun 30% dari target sebelum perubahan sebesar Rp.100.000.000,00. Penurunan ini dikarenakan semakin berkurangnya kesadaran masyarakat membayar pungutan retribusi kebersihan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil ditargetkan sebesar Rp. 1.225.690.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 400.965.000,00 atau 48,62 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 824.725.000,00. Dari penerimaan ini, untuk Bea Cetak KTP ditargetkan sebesar Rp. 697.500.000,00 dan Bea Cetak Akte

Catatan Sipil ditargetkan sebesar Rp. 528.190.000,00. Kenaikan target ini dari Biaya Cetak Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan ditargetkan sebesar Rp. 4.055.900.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 52.500.000,00 atau sebesar 1,31 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 4.003.400.000,00. Kenaikan ini akan diupayakan melalui target Parkir Berlangganan dengan online system dan intensifikasi pemungutan dilapangan untuk Parkir Harian.

Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp. 1.959.800.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditargetkan sebesar Rp. 440.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.000.000,00 atau 1,15 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 435.000.000,00. Naiknya target penerimaan ini disesuaikan dengan potensi pengurusan ijin trayek di Tahun 2009 yang diperkirakan mengalami kenaikan.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditargetkan sebesar Rp. 35.000.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan dari ketetapan semula.

Retribusi Jasa Usaha pemakaian Kekayaan Daerah diperkirakan sebesar Rp. 1.490.634.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 73.250.000,00 atau naik sebesar 5,17 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 1.417.384.000,00. Kenaikan ini diperoleh dari pendapatan sewa gedung.

Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan ditargetkan tetap sebesar Rp. 375.500.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

Retribusi Jasa Usaha Terminal ditargetkan sebesar Rp. 76.492.800,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 12.067.200,00 atau turun 13,63 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 88.560.000,00. Penurunan ini dikarenakan berkurang potensi pada Terminal Babat.

Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir diperkirakan sebesar Rp. 130.658.200,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp.5.000.000,00 atau naik 3,98% dari ketetapan semula sebesar Rp.125.658.200,00.

Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan ditargetkan tetap sebesar Rp. 49.800.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga ditargetkan sebesar Rp. 504.500.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 61.500.000,00 atau naik sebesar 13,88 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 443.000.000,00. Kenaikan target ini diupayakan melalui penyesuaian target penerimaan dari Pengelolaan Makam Sunan Drajad dan Waduk Gondang.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditargetkan sebesar Rp. 890.200.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 139.800.000,00 atau turun sebesar 13,57 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 1.030.000.000,00. Penurunan ini

dipindahkan sebagai penerimaan pembiayaan, karena target semula 2009 termasuk beban yang semestinya harus dikembalikan sebagai penerimaan pada tahun 2008.

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian ditargetkan sebesar Rp. 238.600.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 25.000.000,00 atau naik sebesar 11,70 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 213.600.000,00. Kenaikan ini disesuaikan dengan potensi masa daftar ulang dan ijin baru di tahun 2009.

Retribusi Izin Trayek ditargetkan tetap sebesar Rp. 17.100.000,00, sehingga tidak mengalami perubahan.

Retribusi Ijin Usaha Perikanan ditargetkan tetap sebesar Rp. 10.000.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

Retribusi Izin Jasa Usaha Kontruksi ditargetkan tetap sebesar Rp. 50.000.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

Retribusi Izin Jasa Usaha Perdagangan ditargetkan tetap sebesar Rp.46.500.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan ditargetkan tetap sebesar Rp. 57.600.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

Retribusi Tanda Daftar Industri ditargetkan tetap sebesar Rp. 8.900.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

Retribusi Tanda Daftar Gudang ditargetkan tetap sebesar Rp. 2.000.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

Retribusi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan ditargetkan sebesar Rp. 62.500.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.500.000,00 atau naik sebesar 13,64 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 55.000.000,00

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan ditargetkan tetap sebesar Rp. 45.000.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

Retribusi Izin Penggilingan Padi, Huller dan penyosohan beras ditargetkan sebesar Rp. 25.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.500.000,00 atau naik sebesar 42,86 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 17.500.000,00.

Retribusi Pas Kecil dan Sertifikasi Kesempurnaan Kapal ditargetkan sebesar Rp. 8.000.000,00. sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.000.000,00 atau naik 14,29% dari ketetapan semula sebesar Rp. 7.000.000,00.

Retribusi biaya penggantian pengadaan dokumen ditargetkan tetap sebesar Rp. 850.000.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan

Retribusi Izin eksplorasi, pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah ditargetkan tetap sebesar Rp. 3.000.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan

Retribusi Reklamasi ditargetkan tetap sebesar Rp. 100.000.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan

Retribusi Izin Usaha Pariwisata diperkirakan tetap sebesar Rp. 3.000.000,00. sehingga tidak mengalami perubahan

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Secara keseluruhan dari jenis penerimaan ini ditargetkan sebesar Rp. 13.087.924.395,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 532.924.395,00 atau naik sebesar 4,24 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 12.555.000.000,00.

Selanjutnya untuk mengetahui kenaikan tersebut dapat dilihat pada masing-masing komponen penerimaannya, yakni :

Tabel II.6
Target Setelah Perubahan
Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
A	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	805.000.000,00	1.098.924.395,00	293.924.395,00	36,51%
01	Perusahaan Daerah Bank Daerah	650.000.000,00	943.924.395,00	293.924.395,00	45,22%
02	Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00%
B	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	1.800.000.000,00	2.039.000.000,00	239.000.000,00	13,28%
01	Bank Jawa Timur	1.800.000.000,00	2.039.000.000,00	239.000.000,00	13,28%
	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	9.950.000.000,00	9.950.000.000,00	0,00	0,00%
01	Wisata Bahari Lamongan	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	0,00	0,00%
02	Lamongan Integrated Shorebase (LIS)	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00%
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	12.555.000.000,00	13.087.924.395,00	532.924.395,00	4,24%

Dari masing-masing komponen tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

Penerimaan Bagi Hasil dari PD Bank Daerah Lamongan dialokasikan sebesar Rp. 943.924.395,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 293.924.395,00 atau naik sebesar 45,22% dari ketetapan semula sebesar Rp. 650.000.000,00. Kenaikan tersebut berdasarkan Hasil Audit Pembagian Laba Usaha tahun 2008.

Penerimaan Bagi Hasil dari PD Aneka Usaha Lamongan Jaya ditargetkan tetap sebesar Rp. 155.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan.

Penerimaan Bagi Hasil dari PT. Bank Jatim diperkirakan sebesar Rp. 2.039.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 239.000.000,00 atau naik sebesar 13,28 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 1.800.000.000,00. Kenaikan ini disesuaikan dengan hasil RUPS Tahun 2008.

PT. Wisata Bahari Lamongan ditargetkan tetap sebesar Rp. 9.500.000.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

Lamongan Integreted Shorebase (LIS) ditargetkan tetap sebesar Rp.450.000.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Komponen penerimaan dalam perubahan ini diperkirakan sebesar Rp. 59.216.038.500,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 41.863.275.000,00 atau naik sebesar 241,25 % dari

ketetapan semula sebesar Rp. 17.352.763.500,00. Untuk mengetahui kenaikan penerimaan ini dapat dilihat pada masing-masing komponennya, yakni :

Tabel II.7
Target Penerimaan setelah Perubahan
Lain-Lain PAD Yang Sah

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	420.566.000,00	480.566.000,00	60.000.000,00	14,27%
02	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000,00	500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	-66,67%
	Jasa Giro Kas Daerah	1.500.000.000,00	500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	-66,67%
03	Pendapatan Bunga deposito	3.800.000.000,00	2.150.000.000,00	(1.650.000.000,00)	-43,42%
	Bunga Deposito Kas Daerah	3.800.000.000,00	2.150.000.000,00	(1.650.000.000,00)	-43,42%
04	Pendapatan dari Pengembalian	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00%
	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00%
05	Pendapatan kontribusi usaha SKPD	8.682.197.500,00	53.135.472.500,00	44.453.275.000,00	512,00%
	Dinas Peternakan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00%
	Dinas Pertanian dan Kehutanan	242.000.000,00	298.500.000,00	56.500.000,00	122,52%
	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan	1.163.000.000,00	1.243.000.000,00	80.000.000,00	0,07%
	Kantor Pengelolaan Pasar	104.197.500,00	48.100.972.500,00	47.996.775.000,00	46063,27%
	Dinas Perdagangan dan Koperasi	7.084.000.000,00	3.129.000.000,00	(3.955.000.000,00)	-55,83%
	Kantor Ketahanan Pangan	35.000.000,00	70.000.000,00	35.000.000,00	100,00%
	Sekretariat Daerah	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	~
06	Lain-Lain Pendapatan dari SKPD	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00%
	DPPKA	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	17.352.763.500,00	59.216.038.500,00	41.863.275.000,00	241,25%

Dari masing-masing komponen tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

Dari Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 480.566.000,00 sehingga mengalami kenaikan Rp. 60.000.000,00 atau naik sebesar 14,27 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 420.566.000,00. Kenaikan ini berasal dari Penjualan Barang Afkiran dan Penjualan Bahan Bekas Bangunan.

Untuk Penerimaan Jasa Giro ditargetkan sebesar Rp. 500.000.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 atau turun sebesar 66,67 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 1.500.000.000,00. Penurunan ini diakibatkan ketatnya posisi kas dan proyeksi kecenderungan Suku Bunga SBI yang mengalami penurunan sehingga perlu adanya koreksi target yang ditetapkan.

Untuk Penerimaan Bunga Deposito ditargetkan sebesar Rp. 2.150.000.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 1.650.000.000,00 atau turun sebesar 43,42 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 3.800.000.000,00. Penurunan ini karena ketatnya posisi kas daerah pada anggaran berjalan.

Pendapatan dari pengembalian Pajak Penghasilan Pajak 21 ditargetkan tetap sebesar Rp. 750.000.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

Penerimaan Kontribusi Usaha SKPD, ditargetkan sebesar Rp.53.135.472.500,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar

Rp.44.453.275.000,00 atau naik 512% dari ketetapan semula sebesar Rp.8.682.197.500,000. Kenaikan tersebut sebagian besar berasal dari hasil Penjualan Plaza Lamongan dan Pasar Modern yang diperkirakan diterima tahun 2009 sebesar Rp.48.000.000.000,00 dan ada penurunan pada penerimaan Pasar Agrobis Babat sebesar Rp.4.000.000.000,00

Penerimaan Lain-Lain dari SKPD ditargetkan tidak ada perubahan sesuai target sebesar Rp. 2.200.000.000,00

2. DANA PERIMBANGAN

Penerimaan Dana Perimbangan dalam perubahan ini dialokasikan sebesar Rp. 735.106.591.717,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 12.950.605.000,00 atau turun sebesar 1,73 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 748.057.196.717,00. Secara rinci terhadap penurunan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini :

Tabel II.8
Target Dana Perimbangan

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	<u>82.767.756.717,00</u>	<u>69.827.762.717,00</u>	<u>(12.939.994.000,00)</u>	<u>15,63%</u>
	Bagi Hasil Pajak	78.271.495.717,00	65.331.501.717,00	(12.939.994.000,00)	-16,53%
01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	71.094.652.000,00	58.154.658.000,00	(12.939.994.000)	-18,20%
02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.065.581.033,00	3.065.581.033,00	0,00	0,00%
03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	4.111.262.684,00	4.111.262.684,00	0,00	0,00%
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.496.261.000,00	4.496.261.000,00	0,00	0,00%

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	459.150.000,00	459.150.000,00	0,00	0,00%
05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	6.110.000,00	6.110.000,00	0,00	0,00%
06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	248.450.000,00	248.450.000,00	0,00	0,00%
08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	3.580.912.000,00	3.580.912.000,00	0,00	0,00%
09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	201.639.000,00	201.639.000,00	0,00	0,00%
	Dana Alokasi Umum	581.728.440.000,00	581.718.829.000,00	(9.611.000,00)	0,00%
01	Dana Alokasi Umum	581.728.440.000,00	581.718.829.000,00	(9.611.000,00)	0,00%
	Dana alokasi khusus	83.561.000.000,00	83.560.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00%
01	Bidang Pendidikan	50.111.000.000,00	50.111.000.000,00	0,00	0,00%
02	Bidang Kesehatan	9.237.000.000,00	9.237.000.000,00	0,00	0,00%
03	Bidang Kehutanan	925.000.000,00	925.000.000,00	0,00	0,00%
04	Bidang Infrastruktur Jalan	7.495.000.000,00	7.495.000.000,00	0,00	0,00%
05	Bidang Infrastruktur Irigasi	3.061.000.000,00	3.061.000.000,00	0,00	0,00%
06	Bidang Infrastruktur Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	3.178.000.000,00	3.178.000.000,00	0,00	0,00%
07	Bidang Kelautan dan Perikanan	2.968.000.000,00	2.968.000.000,00	0,00	0,00%
08	Bidang Pertanian	4.003.000.000,00	4.002.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00%
09	Bidang Perdagangan	514.000.000,00	514.000.000,00	0,00	0,00%
10	Bidang Lingkungan Hidup	691.000.000,00	691.000.000,00	0,00	0,00%
11	Bidang Keluarga Berencana	1.378.000.000,00	1.378.000.000,00	0,00	0,00%
	DANA PERIMBANGAN	748.057.196.717,00	735.106.591.717,00	(12.950.605.000,00)	-1,73%

Selanjutnya terhadap masing-masing komponen Dana Perimbangan dapat diuraikan sebagai berikut :

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditargetkan sebesar Rp. 58.154.658.000,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 12.939.994.000,00 atau turun sebesar 18,20 % dari target yang ditetapkan sebelum perubahan sebesar Rp. 71.094.652.000,00. Penurunan ini menyesuaikan ketentuan

sementara dari pemerintah pusat.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tidak mengalami perubahan sesuai targetnya sebesar Rp. 3.065.581.033,00

Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Pasal 21) tidak mengalami perubahan sesuai targetnya sebesar Rp. 411.262.684,00.

Provisi Sumber Daya Hutan tidak mengalami perubahan sesuai targetnya sebesar Rp. 459.150.000,00.

Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty) tidak mengalami perubahan sesuai targetnya sebesar Rp. 6.110.000,00.

Penerimaan Pungutan Pengusahaan Hasil Perikanan tidak mengalami perubahan sesuai targetnya sebesar Rp. 248.450.000,00.

Penerimaan dari sektor Pertambangan Minyak Bumi tidak mengalami perubahan sesuai targetnya sebesar Rp. 3.580.912.000,00.

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi tidak mengalami perubahan sesuai targetnya sebesar Rp. 201.639.000,00.

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Lamongan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 581.718.829.000,00 yang berarti mengalami

penurunan sebesar Rp.9.611.000,00 atau turun sebesar 0,0016% dari target semula sebesar Rp.581.728.440.000,00, hal ini menyesuaikan ketentuan dari Pemerintah Pusat.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam perubahan ini dialokasikan sebesar Rp. 83.560.000.000,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp.1.000.000,00 atau turun sebesar 0,001% dari target semula sebesar Rp.83.561.000.000,00 hal ini menyesuaikan ketentuan dari Pemerintah Pusat.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Yang Sah dalam perubahan ini dialokasikan sebesar Rp. 122.357.121.950,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 80.243.816.885,00 atau naik sebesar 190,54% dari target semula sebesar Rp. 42.113.305.065,00. Secara rinci terhadap kenaikan tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel II.9
Target Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI	<u>35.164.084.465,00</u>	<u>38.118.808.550,00</u>	<u>2.954.724.085,00</u>	<u>8,40%</u>
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	35.164.084.465,00	38.118.808.550,00	2.954.724.085,00	8,40%
01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	10.609.582.212,00	10.731.728.200,00	122.145.988,00	1,15%
02	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.498.229.840,00	11.127.830.050,00	2.629.600.210,00	30,94%
03	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.515.087.766,00	15.673.635.250,00	158.547.484,00	1,02%

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
04	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	110.378.636,00	117.918.100,00	7.539.464,00	6,83%
05	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	403.633.636,50	467.696.950,00	64.063.314,00	15,87%
06	Sumbangan Pihak Ketiga	27.172.375,00	0,00	(27.172.375,00)	-100%
	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	6.949.220.600,00	80.906.600.000,00	73.957.379.400,00	1064,25%
	Dana Penyesuaian	6.949.220.600,00	80.906.600.000,00	73.957.379.400,00	1064,25%
01	Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan	5.250.520.600,00	34.000.000.000,00	28.749.479.400,00	547,55%
02	Dana Penyesuaian Alokasi Cukai	1.698.700.000,00	7.471.800.000,00	5.773.100.000,00	339,85%
03	Dana Penyesuaian Percepatan Pembangunan Daerah	0,00	39.434.800.000,00	39.434.800.000,00	100%
	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00	3.294.880.000,00	3.294.880.000,00	100,00%
	Bantuan Keuangan dari Propinsi	0,00	3.294.880.000,00	3.294.880.000,00	100,00%
01	Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur	0,00	3.294.880.000,00	3.294.880.000,00	100,00%
	DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH	0,00	36.833.400,00	36.833.400,00	100%
01	Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	36.833.400,00	36.833.400,00	100%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.113.305.065,00	122.357.121.950,00	80.243.816.885,00	190,54%

Selanjutnya terhadap masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut :

Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi, ditargetkan sebesar 38.118.808.550,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.954.724.085,00 atau naik sebesar 8,40 % dari target semula sebesar Rp.35.164.084.465,00. Penerimaan ini secara keseluruhan berasal dari Bagi Hasil Propinsi yang terdiri dari :

Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan sebesar Rp. 10.731.728.200,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 122.145.988,00 atau naik sebesar 1,15 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 10.609.582.212,00.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan sebesar Rp.11.127.830.050,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.629.600.210,00 atau naik sebesar 30,94 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 8.498.229.840,00.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan sebesar Rp. 15.673.635.250,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 158.547.484,00 atau naik sebesar 1.02 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 15.515.087.766,00.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dialokasikan sebesar Rp. 117.918.100,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp.7.539.464,00 atau naik sebesar 6,83 % dari ketetapan semula sebesar Rp.110.378.636,00.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dialokasikan sebesar Rp. 467.696.950,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 64.063.314,00 atau naik sebesar 15,87 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 403.633.636,00.

Sumbangan Pihak Ketiga dialokasikan sebesar Rp. 0,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 27.172.375,00,00 atau turun sebesar 100 % dari ketetapan semula Rp. 27.172.375,00 karena sifatnya bukan masuk komponen Bagi Hasil Pajak Propinsi, maka dipindah masuk pada penerimaan Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi.

Dana Penyesuaian / Otonomi Khusus dialokasikan sebesar Rp. 80.906.600.000,00, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp.73.957.379.400,00 atau naik sebesar 1064,25% dari target semula sebesar Rp.6.949.220.600,00 dengan komponennya sebagai berikut :

Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan dialokasikan sebesar Rp. 34.000.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.749.479.400,00 atau naik sebesar 547,55 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 5.250.520.600,00.

Dana Penyesuaian Alokasi Cukai dialokasikan sebesar Rp. 7.471.800.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.773.100.000,00 atau naik sebesar 339,85 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 1.698.700.000,00.

Dana Penyesuaian Percepatan Pembangunan Daerah dialokasikan sebesar Rp. 39.434.800.000,00 sebelumnya belum ditargetkan untuk penerimaannya.

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dialokasikan sebesar Rp. 3.294.880.000,00 sebelumnya belum ditargetkan untuk penerimaannya. Penerimaan ini antara lain digunakan untuk :

- a. Bantuan TMMD sebesar Rp.100.000.000,00
- b. Pembangunan Jembatan Rp.600.000.000,00
- c. Manajemen Penyelenggaraan UAS Standar Nasional Rp.95.000.000,00

- d. Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana Jalan
Rp.2.291.320.000,00
- e. Gerdu taskin sebesar Rp. 123.060.000,00
- f. P2SEM sebesar Rp. 70.000.000,00
- g. SMPP sebesar Rp. 10.000.000,00
- h. Pengembangan BUMDesa sebesar Rp.2.500.000,00
- i. Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana sebesar
Rp.3.000.000,00

Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Penerimaan Daerah dialokasikan sebesar Rp. 36.833.400,00 sebelumnya belum ditergetkan untuk penerimaannya. Target ini sebagai penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

BAB III**KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA****KONDISI UMUM ANGGARAN BELANJA**

Penentuan alokasi Belanja Daerah pada proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 difokuskan pada penyehatan fiskal yang berkesinambungan, dalam arti bahwa penentuan alokasi belanja disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang telah diperhitungkan secara matang. Karena bagaimanapun sumber alokasi belanja ditentukan oleh 2 hal, yakni bagaimana kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerah dan memanfaatkan sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2008 yang baru saja telah ditetapkan.

Ditinjau dari sumber pendapatan, untuk menopang kebutuhan belanja dalam perubahan APBD tahun Anggaran 2009 ini, kapasitas pendapatan yang telah dihimpun secara keseluruhan dilakukan kenaikan sebesar Rp. 112.379.758.080,00 atau naik 13,12 %.

Kemudian sumber dari pembiayaan daerah dengan memanfaatkan selisih dari penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2008 yang mencapai Rp. 46.779.487.247,25 atau ada penurunan sebesar Rp.2.583.198.052,75 dibandingkan target APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 49.362.685.300,00.

Dengan kapasitas fiskal yang dimiliki untuk kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 28.141.583.200,00. Dengan volume tersebut, maka

Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya menerapkan kebijakan fiskal ketat untuk lebih memaksimalkan arah dan kebijakan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna.

Ditinjau dari kinerja belanja daerah selama tahun anggaran berjalan, selama semester pertama daya serap belanja daerah tahun anggaran 2009 telah mencapai 40,43 % dari belanja yang sudah dialokasikan disemua SKPD. Besaran realisasi tersebut apabila ditinjau dari komponennya, maka daya serap belanja yang paling tinggi dicapai oleh Belanja Tidak Langsung yang mencapai tingkat realisasi sebesar 47,52 %. Hal ini karena dipengaruhi adanya kebijakan yang telah dilaksanakan yakni adanya pembayaran kekurangan kenaikan gaji, untuk pembayaran hibah kepada Pemerintah Desa, pembayaran bantuan sosial kemasyarakatan dan pembayaran bantuan keuangan kepada desa dengan rata-rata telah terealisasi di atas 50 %. Sedangkan untuk belanja langsung yang membiayai kegiatan masih berkisar 27,42 %. Penyerapan belanja langsung disesuaikan dengan pengaturan dan penyediaan kas dari masing-masing kegiatan.

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA TAHUN ANGGARAN 2009

Sebagaimana penjelasan diatas, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, diharapkan kebutuhan belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun 2009 dapat menjalankan fungsinya sebagai dinamisator pembangunan daerah

Oleh karena itu pelaksanaan Belanja tahun 2009 harus dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga masih mampu

untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Penentuan alokasi Belanja Daerah pada proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 betul-betul dilakukan dengan penganggaran yang ketat (*tight budgeting policy*) difokuskan pada penyehatan fiskal yang berkesinambungan, dalam arti bahwa penentuan alokasi belanja disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang telah diperhitungkan secara matang. Karena bagaimanapun sumber alokasi belanja ditentukan oleh dua hal, yakni pertama, bagaimana kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerah dan kedua, memanfaatkan sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2008 yang baru saja telah ditetapkan.

Untuk menopang kebutuhan belanja dalam perubahan APBD tahun anggaran 2009 ini, ditinjau dari sumber pendapatan yang telah dihimpun, secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar *112 milyar 379 juta 758 ribu 80 rupiah atau naik 13,12 persen*. Kemudian sumber dari pembiayaan daerah dengan memanfaatkan selisih dari penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2008 yang mencapai *46 milyar 779 juta 487 ribu 247 rupiah 25 sen*, ternyata dari hasil audit perhitungan APBD tahun 2008 yang baru saja ditetapkan ada penurunan sebesar *2 milyar 583 juta 198 ribu 52 rupiah 75 sen* atau turun *5,23 persen* dari target sebelum perubahan sebesar *49 milyar 362 juta 685 ribu 300 rupiah*.

Dengan memanfaatkan sumber Pendapatan Daerah dari selisih SILPA Perhitungan tahun 2008 yang ternyata lebih kecil daripada besaran SILPA yang ditargetkan pada APBD tahun

2009, hal ini tentu akan mempersempit pergerakan belanja daerah dengan menyesuaikan kapasitas fiskal yang dimiliki.

Kurangnya stimulasi fiskal dari Pemerintah Pusat, berimplikasi pada kebijakan belanja daerah, disisi lain Pemerintah Kabupaten Lamongan dihadapkan pada sejumlah agenda pembangunan yang tentunya memerlukan dukungan dana yang cukup besar. Untuk itu anggaran belanja pada perubahan APBD ini lebih memfokuskan pada penyesuaian belanja yang merupakan kebijakan Pemerintah dan belanja daerah untuk kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis melalui upaya konsolidasi dan rasionalisasi fiskal secara menyeluruh.

Dengan melihat kondisi serta perkembangan tersebut, maka Belanja Daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2009, diarahkan sebagai berikut :

1. Untuk mencukupi kekurangan anggaran belanja pegawai dari kenaikan gaji rata-rata 15 % dan tambahan formasi pegawai baru.
2. Pembangunan Rumah Sakit Ngimbang dari dana dekonsentrasi percepatan pembangunan (dana stimulus)
3. Pembelian rumah dan tanah untuk Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Lamongan di Jakarta.
4. Memberikan tambahan kenaikan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD)
5. Hibah pembangunan jalan poros desa
6. Pembebasan Tanah Rawa - Jabung
7. Mencukupi kewajiban Dana sharing kegiatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi
8. Tambahan Dana Penyesuaian Tunjangan Fungsional Kependidikan

9. Kegiatan yang diarahkan dari dana alokasi cukai
10. Kegiatan lainnya yang sudah diarahkan oleh pemerintah baik pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat.

ALOKASI BELANJA PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2009

Dari berbagai penelaahan kondisi dan arah serta kebijakan anggaran belanja, maka volume Belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 dialokasikan sebesar *1 trilyun 22 milyar 541 juta 377 ribu 709 rupiah 25 sen* atau mengalami kenaikan sebesar 13,35 persen.

Untuk melihat secara rinci alokasi Anggaran Belanja Setelah Perubahan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel III.1
Alokasi Belanja Setelah Perubahan menurut Fungsi

Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
Belanja Tidak Langsung	583.864.284.006	642.289.026.384,25	58.424.742.378,25	10,01
Belanja pegawai	481.080.271.506	525.562.213.806,00	44.481.942.300,00	9,25
Belanja bunga	29.271.000	29.271.000,00	-	0,00
Belanja hibah	35.336.530.000	43.725.450.000,00	8.388.920.000,00	23,74
Belanja bantuan sosial	21.242.700.000	23.832.700.000,00	2.590.000.000,00	12,19
Belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa	1.947.754.500	2.452.580.500,00	504.826.000,00	25,92
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	42.727.757.000	45.259.007.000,00	2.531.250.000,00	5,92
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	1.427.804.078,25	(72.195.921,75)	-4,81
			-	
Belanja Langsung	318.185.692.525	380.252.351.325,00	62.066.658.800,00	19,51
Belanja pegawai	26.471.108.370	26.230.063.270,00	(241.045.100,00)	-0,91
Belanja barang dan jasa	123.812.051.644	130.691.399.344,00	6.879.347.700,00	5,56
Belanja modal	167.902.532.511	223.330.888.711,00	55.428.356.200,00	33,01
Jumlah Belanja	902.049.976.531	1.022.541.377.709,25	120.491.401.178,25	13,36

Dari tabel diatas dengan meninjau alokasi belanja menurut fungsi disampaikan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Belanja Tidak Langsung** setelah perubahan dialokasikan mengalami kenaikan sebesar 10% atau dianggarkan sebesar Rp. 642.289.026.384,25 atau naik sebesar Rp. 58.424.742.378,25 dari target sebelum perubahan sebesar Rp. 583.864.284.006.

Dari masing-masing komponen Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar 9,25 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 525.562.213.806 atau naik sebesar Rp. 44.481.942.300,00 dari target sebelum perubahan sebesar Rp. 481.080.271.506,00, kenaikan belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk menampung adanya kenaikan gaji pegawai dan tambahan formasi pegawai baru dimana dalam penyerapan belanja berjalan dalam perhitungan satu tahun dari alokasi target sebelum perubahan belum mencukupi.

Belanja Bunga dialokasikan tetap sebesar 29.271.000,00. Belum adanya kebijakan hutang baru maka belanja bunga masih dialokasikan tetap.

Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar 23,74 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 43.725.450.000,00 atau naik sebesar Rp. 8.388.920.000,00 dari target sebelum perubahan sebesar Rp. 35.336.530.000,00. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk alokasi belanja poros desa yang direncanakan untuk 123 desa, belum termasuk program PNPM Mandiri yang sumber dananya dari Pemerintah Pusat, selain itu juga menampung dana Jamkesmas untuk masyarakat miskin.

Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar 12,19% atau dianggarkan sebesar Rp. 23.832.700.000,00 naik sebesar Rp. 2.590.000.000,00 dari target sebelum perubahan sebesar Rp. 21.242.700.000,00 . Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk Bantuan kegiatan PHBN, Kekurangan sharing PNPB Mandiri Perkotaan, Kekurangan sharing PNPB Pengembangan Kecamatan dan menampung tambahan bantuan Partai Politik yang disesuaikan dengan jumlah kursi anggota DPRD.

Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa mengalami kenaikan sebesar 25,92 % atau dianggarkan sebesar Rp. 2.452.580.500,00 naik sebesar Rp. 504.826.000,00 dari target sebelum perubahan sebesar Rp. 1.947.754.500,00. Kenaikan tersebut digunakan untuk mencukupi kekurangan tahun 2008 dan menyesuaikan kenaikan target pendapatan.

Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa mengalami kenaikan sebesar 5,92 % dianggarkan sebesar Rp. 45.259.007.000,00 naik sebesar Rp. 2.531.250.000,00 dari target sebelum perubahan sebesar Rp. 42.727.757.000,00. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk memberikan tambahan kenaikan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD).

Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD mengalami penurunan sebesar 4,81 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 1.427.804.078,25 turun sebesar Rp. 72.195.921,75 dari target sebelum perubahan sebesar Rp. 1.500.000.000,00.

Dana tersebut menampung dana cadangan dalam menghadapi bencana alam dan sosial, selain itu juga berfungsi untuk menyeimbangkan pembiayaan netto sehingga seluruh kapasitas fiskal sudah dialokasikan didalam Perubahan APBD.

- b. Belanja Langsung** menampung kegiatan-kegiatan setiap SKPD, pada perubahan APBD ini mengalami kenaikan sebesar 19,51 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 380.252.351.325,00 naik sebesar Rp. 62.066.658.800,00 dari sebelum perubahan sebesar Rp. 318.185.692.525,00.

Dari masing-masing komponen Belanja Langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar 0,91% atau dianggarkan sebesar Rp. 26.230.063.270,00 turun sebesar Rp. 241.045.100,00 dari sebelum perubahan sebesar Rp. 26.471.108.370,00. Penurunan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung merupakan efisiensi belanja personil.

Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar 5,54 % atau dianggarkan sebesar Rp. 130.691.399.344,00 naik sebesar Rp. 6.879.347.700,00 dari sebelum perubahan sebesar Rp. 123.812.051.644,00. Kenaikan belanja barang dan jasa sebagian besar difungsikan sebagai biaya operasional dalam suatu kegiatan yang penggunaanya bersifat habis pakai.

Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 33,01 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 223.330.888.711,00 naik sebesar Rp. 55.428.356.200,00 dari target sebelum perubahan sebesar Rp. 167.902.532.511,00. Kenaikan

Belanja Modal dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat menambah aset daerah, meliputi pengadaan barang, bangunan, konstruksi dan peralatan.

Kemudian Belanja Daerah setelah perubahan ditinjau menurut organisasi, dapat dilihat tabel dibawah ini

Tabel III.2
Alokasi Belanja Setelah Perubahan menurut Organisasi

NO	SKPD	SEBELUM	SESUDAH	PERUBAHAN	%
1	DINAS PENDIDIKAN	405.513.091.300,00	447.869.582.300,00	42.356.491.000,00	10,45%
2	DIN. KES	52.449.623.500,00	95.116.198.600,00	42.666.575.100,00	81,35%
3	RSUD Dr. SOEGIRI	22.346.249.670,00	25.108.044.470,00	2.761.794.800,00	12,36%
4	DPU. BINA MARGA	27.083.121.000,00	27.419.095.500,00	335.974.500,00	1,24%
5	DPU. PENGAIRAN	13.764.974.000,00	13.723.422.500,00	(41.551.500,00)	-0,30%
6	DPU. CIPTA KARYA	47.998.156.450,00	48.936.607.150,00	938.450.700,00	1,96%
7	BAPPEDA	7.059.739.000,00	7.648.316.600,00	588.577.600,00	8,34%
8	KANTOR LITBANG	1.330.205.000,00	1.036.481.000,00	(293.724.000,00)	-22,08%
9	DIN. PERHUB	6.130.662.400,00	6.418.346.700,00	287.684.300,00	4,69%
10	BADAN L H	3.162.100.000,00	3.685.676.500,00	523.576.500,00	16,56%
11	CAPILDUK	2.463.185.000,00	3.200.015.300,00	736.830.300,00	29,91%
12	BPPKB	11.915.747.000,00	11.904.971.000,00	(10.776.000,00)	-0,09%
13	SOSNAKER	3.972.269.350,00	4.370.000.500,00	397.731.150,00	10,01%
14	KOPERINDAG	6.480.125.000,00	7.413.956.400,00	933.831.400,00	14,41%
15	P MODAL	1.322.556.000,00	945.724.000,00	(376.832.000,00)	-28,49%
16	DISBUDPAR	2.431.701.900,00	2.922.262.300,00	490.560.400,00	20,17%
17	DISPORA	2.566.892.500,00	2.856.740.300,00	289.847.800,00	11,29%
18	BAKESBANG	3.481.895.500,00	3.784.208.000,00	302.312.500,00	8,68%
19	POL PP	3.201.844.500,00	3.527.841.800,00	325.997.300,00	10,18%
20	DPRD	7.309.794.663,00	7.309.794.663,00	-	0,00%
21	KDH & WAKIL	564.475.610,00	564.475.610,00	-	0,00%
22	SETDA	40.649.184.565,00	54.140.306.215,00	13.491.121.650,00	33,19%
23	SETWAN	10.837.690.890,00	11.008.953.790,00	171.262.900,00	1,58%
24	DPPKA	126.280.412.283,00	136.744.706.161,25	10.464.293.878,25	8,29%
25	INSPEKTORAT	4.003.907.500,00	4.017.274.000,00	13.366.500,00	0,33%
26	KEC/KEL	36.724.410.000,00	36.069.858.000,00	(654.552.000,00)	-1,78%
27	BKD	5.502.746.500,00	5.815.200.000,00	312.453.500,00	5,68%
28	PERIJINAN	1.368.595.500,00	1.398.961.550,00	30.366.050,00	2,22%
29	K PANGAN	1.077.591.000,00	773.285.000,00	(304.306.000,00)	-28,24%
30	BPMD	3.912.499.000,00	4.488.292.600,00	575.793.600,00	14,72%
31	ARSIP PERPUS	2.270.383.500,00	2.694.414.500,00	424.031.000,00	18,68%
32	KPDE	2.254.042.250,00	2.341.314.500,00	87.272.250,00	3,87%
33	DISTANHUT	18.796.898.200,00	19.544.947.000,00	748.048.800,00	3,98%

34	DISNAKWAN	2.067.262.000,00	2.927.163.000,00	859.901.000,00	41,60%
35	PERIKANAN	8.768.666.000,00	7.351.311.400,00	(1.417.354.600,00)	-16,16%
36	KANTOR PASAR	4.987.278.000,00	7.463.628.800,00	2.476.350.800,00	49,65%
	JUMLAH	902.049.976.531,00	1.022.541.377.709,25	120.491.401.178,25	13,36%

Untuk memperjelas rencana pencapaian Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, uraian belanja daerah sesuai dengan stuktur organisasi, dengan uraian sebagai berikut :

1. **Dinas Pendidikan** alokasi belanjanya mengalami kenaikan 10,45 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 447.869.582.300,00 naik sebesar Rp. 42.356.491.000,00 . Kebijakan di bidang pendidikan setelah perubahan diarahkan untuk penyelenggaraan SBI SMU Negeri I Lamongan. Disamping itu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah merencanakan mengeluarkan kebijakan dengan memberikan tambahan penyesuaian tunjangan fungsional kependidikan.
2. **Dinas Kesehatan**, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 81,35 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 95.116.198.600,00 naik sebesar Rp. 42.666.575.100,00. Kenaikan ini sebgaiian besar untuk kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Ngimbang bersumber dari dana Hibah Pemerintah Pusat, Kegiatan untuk penyediaan biaya operasional dan jasa administrasi Askes, peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan untuk belanja makan dan minum pasien di puskesmas terkait kenaikan target pendapatan serta kegiatan yang bersumber dari dana cukai yang sebgaiian besar untuk pengadaan

peralatan kesehatan bagi penderita akibat rokok, pendirian dan pengembangan poliklinik akibat rokok di puskesmas.

3. **RSD Dr. Soegiri**, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 12,36 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 25.108.044.470,00 naik sebesar Rp. 2.761.794.800,00. Kenaikan ini dipergunakan untuk belanja operasional ASKES dampak kenaikan pendapatan ASKES, Akreditasi Rumah Sakit untuk mempertahankan penilaian status Rumah Sakit Tipe B, pengembangan instalasi listrik untuk operasional alat Hemodialisis dan pengadaan alat kesehatan bagi penderita dampak rokok berasal dari dana cukai.
4. **Dinas PU Bina Marga**, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 1,24 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 27.419.095.500,00 naik sebesar Rp. 335.974.500,00. Kenaikan belanjanya diarahkan untuk Rehabilitasi Jalan guna mempertahankan dan memelihara jalan-jalan Kabupaten yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.
5. **Dinas PU Pengairan**, alokasinya mengalami penurunan sebesar 0,30 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 13.723.422.500,00, turun sebesar Rp. 41.551.500,00. Penurunan belanja ini karena menyesuaikan penyerapan belanja tenaga kontrak yang diperhitungkan dalam satu tahun.
6. **Dinas PU Cipta Karya**, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 1,96 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 48.936.607.150,00 naik sebesar Rp. 938.450.700,00. Alokasi kenaikan tersebut antara lain diarahkan untuk pemeliharaan stadion dan alon-alon kota Lamongan, Pendampingan pembangunan instalasi sumber air/jaringan distribusi kecamatan Karangbinangun dan Paciran (P2TPD),

BOP PNPM Perkotaan dan Pemeliharaan Lampu Jalan Umum.

7. **Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah**, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 8,34 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 7.648.316.600,00 naik sebesar Rp.588.577.600,00. Kenaikan tersebut diantaranya dipergunakan untuk kegiatan TMMD Dana bantuan APBD Propinsi, Sosialisasi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan kegiatan yang bersumber dari dana cukai.
8. **Kantor Litbangda**, alokasi belanjanya mengalami penurunan sebesar 22,08 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 1.036.481.000,00 turun sebesar Rp. 293.724.000,00. Penurunan ini menyesuaikan penyerapan belanja gaji yang diperhitungkan dalam satu tahun, selain itu terdapat tambahan belanja alokasi dana cukai untuk melakukan penelitian dampak kebijakan pemerintah tentang pembatasan merokok bagi masyarakat petani tembakau dan industri rokok.
9. **Dinas Perhubungan**, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 4,69 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 6.418.346.700,00 naik sebesar Rp. 287.684.300,00. Kenaikan belanja diantaranya menyesuaikan penyerapan belanja gaji pegawai dalam perkiraan satu tahun.
10. **Badan Lingkungan Hidup**, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 16,56 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 3.685.676.500,00 naik sebesar Rp. 523.576.500,00. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk kegiatan yang diarahkan bersumber dari dana cukai, dan kegiatan mendukung adipura.

-
- 11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 29,91 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 3.200.015.300,00 naik sebesar Rp. 736.830.300,00 . Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk pengadaan komputer server dan aplikasi untuk penyesuaian database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
- 12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**, alokasi belanjanya mengalami penurunan sebesar 0,09 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 11.904.971.000,00 turun sebesar Rp. 10.776.000,00. Penurunan karena menyesuaikan penyerapan belanja gaji pegawai yang diperhitungkan dalam satu tahun. Selain itu terdapat kenaikan belanja langsung yang dipergunakan untuk pembinaan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau yang sumber dananya dari dana cukai.
- 13. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 10,01 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 4.370.000.500,00 naik sebesar Rp. 397.731.150,00. Kenaikan belanjanya dipergunakan untuk menampung kegiatan yang bersumber dari dana cukai dengan sasaran kegiatan kewirausahaan, ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri tembakau dan kelompok masyarakat di wilayah tembakau.
- 14. Dinas Perdagangan dan Koperasi**, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 14,41 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 7.413.956.400,00 naik sebesar Rp. 933.831.400,00. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk tambah daya listrik kantor baru dan showroom,
-

perlengkapan gedung, fasilitasi pembangunan pasar Babat dan kegiatan bersumber dari dana cukai yang digunakan untuk kegiatan pelatihan teknis ditujukan kepada kelompok masyarakat petani tembakau dan para pekerja dibidang rokok serta melakukan upaya optimalisasi untuk meningkatkan peran usaha tembakau di Kabupaten Lamongan.

15. Kantor Penanaman Modal, alokasi belanjanya mengalami penurunan sebesar 28,49 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 945.724.000,00 turun sebesar Rp. 376.832.000,00. Penurunan belanja ini diantaranya menyesuaikan penyerapan belanja gaji yang diperhitungkan dalam satu tahun.

16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 20,17 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 2.922.262.300,00 naik sebesar Rp. 490.560.400,00. Kenaikan ini menyesuaikan penyerapan belanja gaji yang diperhitungkan dalam satu tahun.

17. Dinas Pemuda dan Olahraga, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 11,29 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 2.856.740.300,00 naik sebesar Rp. 289.847.800,00. Kenaikan diantaranya menyesuaikan penyerapan belanja gaji yang diperhitungkan dalam satu tahun dan untuk pengadaan sarana olahraga gulat berupa matras.

18. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 8,68 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 3.784.208.000,00 naik sebesar Rp. 302.312.500,00. Kenaikan diantaranya untuk menyesuaikan penyerapan belanja gaji dalam satu tahun dan

menampung kegiatan kesiapsiagaan aparat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban.

19. Satuan Polisi Pamong Praja, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 10,18 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 3.527.841.800,00 naik sebesar Rp. 325.997.300,00. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk operasi yang berkenaan dengan cukai ilegal.

20. DPRD, tidak mengalami perubahan.

21. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, alokasi belanjanya tidak mengalami perubahan

22. Sekretariat Daerah, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 33,19 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 54.140.306.215,00 naik sebesar Rp.13.491.121.650,00. Kenaikan belanja Sekretariat Daerah diantaranya dipergunakan untuk Pembelian Rumah Perwakilan di Jakarta, Pengadaan tanah untuk Pembangunan Rowo Jabung *Ring Dyke*, Tambah Daya Listrik dan Kegiatan yang bersumber dari dana cukai.

23. Sekretariat DPRD, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 1,58 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 11.008.953.790,00 naik sebesar Rp.171.262.900,00. Kenaikan ini menyesuaikan penyerapan belanja gaji pegawai yang diperhitungkan dalam satu tahun anggaran.

24. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset, secara keseluruhan alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 8,29 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 136.744.706.161,25 naik sebesar Rp. 10.464.293.878,25. Kenaikan terdapat pada belanja tidak langsung, belanja hibah poros desa, belanja bantuan sosial kewajiban dana-dana sharing, belanja bantuan keuangan tambahan TPAPD

dan belanja bagi hasil pemungutan PBB dan PAD, selain itu juga terjadi penurunan belanja langsung.

25. Inspektorat Daerah, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 0,33 persen atau dianggarkan sebesar Rp.4.017.274.000,00 naik sebesar Rp.13.366.500,00. Kenaikan dipergunakan untuk tambahan peralatan gedung kantor.

26. Kecamatan dan Kelurahan, alokasi belanjanya mengalami penurunan sebesar 1,78 persen atau dianggarkan sebesar Rp.36.069.858.000,00 turun sebesar Rp. 654.552.000,00. Penurunan ini karena menyesuaikan penyerapan belanja gaji yang diperhitungkan dalam satu tahun.

27. Badan Kepegawaian, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 5,68 persen atau dianggarkan sebesar Rp.5.815.200.000,00 naik sebesar Rp. 312.453.500,00. Kenaikan belanja diantaranya dipergunakan untuk peningkatan kinerja pegawai.

28. Kantor Perijinan, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 2,22 persen atau dianggarkan sebesar Rp.1.398.961.550,00 naik sebesar Rp. 30.366.050,00. Kenaikan ini karena menyesuaikan penyerapan belanja gaji yang diperhitungkan dalam satu tahun.

29. Kantor Ketahanan Pangan, alokasi belanjanya menurun 28,24 persen atau dianggarkan sebesar Rp.773.285.000,00 turun sebesar Rp.304.306.000,00. Penurunan Kenaikan ini menyesuaikan penyerapan belanja pegawai yang diperhitungkan dalam satu tahun

30. Badan Pemberdayaan Masyarakat, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 14,72 persen atau dianggarkan sebesar Rp.4.488.292.600,00 naik sebesar

Rp. 575.793.600,00. Kenaikan dipergunakan untuk operasional Gerdutaskin, PNPM Mandiri, P2SEM, Pelatihan dan memberi ketrampilan bagi keluarga miskin di wilayah petani tembakau dari dana cukai.

31. Badan Perpustakaan dan Arsip, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 18,68 persen atau dianggarkan sebesar Rp.2.694.414.500,00 naik sebesar Rp. 424.031.000,00. Kenaikan ini menyesuaikan penyerapan belanja gaji yang diperhitungkan dalam satu tahun.

32. Kantor Pengelolaan Data Elektronik, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 3,87 persen atau dianggarkan sebesar Rp.2.341.314.500,00 naik sebesar Rp. 87.272.250,00. Kenaikan ini menyesuaikan penyerapan belanja gaji yang diperhitungkan dalam satu tahun, selain itu ada penambahan menara backbone 1 titik.

33. Dinas Pertanian dan Kehutanan, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 3,98 persen atau dianggarkan sebesar Rp.19.544.947.000,00 naik sebesar Rp.748.048.800,00. Kenaikan dipergunakan untuk kegiatan pendampingan dana bantuan kegiatan PLA (Pengelolaan Lahan dan Air) dan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana cukai.

34. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, belanjanya mengalami kenaikan sebesar 41,60 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 2.927.163.000,00 naik sebesar Rp. 859.901.000,00. Kenaikan ini karena menyesuaikan penyerapan gaji pegawai yang diperhitungkan dalam satu tahun.

35. Dinas Perikanan dan Kelautan, alokasi belanjanya mengalami penurunan sebesar 16,16 persen atau

dianggarkan sebesar Rp. 7.351.311.400,00 turun sebesar Rp. 1.417.354.600,00. Penurunan ini menyesuaikan penyerapan belanja pegawai yang diperhitungkan dalam satu tahun.

- 36. Kantor Pengelolaan Pasar,** alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar 49,65 persen atau dianggarkan sebesar Rp. 7.463.628.800,00 naik sebesar Rp. 2.476.350.800,00.. Kenaikan antara lain dipergunakan untuk biaya pemasaran dan promosi Plaza Lamongan dan Pasar Modern.

BAB IV
KONDISI DAN KEBIJAKAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

KONDISI UMUM PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur APBD Tahun 2009 sebagaimana penjelasan bab diatas, menggunakan sistem anggaran kinerja sehingga menyebabkan anggaran pada periode tertentu harus mengalami surplus atau defisit, begitu juga struktur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009. Dengan kondisi suatu anggaran yang surplus atau defisit tersebut maka Pembiayaan sangat mutlak diperlukan melalui kebijakan keuangan.

Didalam unsur Pembiayaan Daerah terdapat 2 komponen yakni Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari beberapa unsur yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu, Pencairan dari Dana Cadangan, Penerimaan Piutang Retribusi Daerah dan Penerimaan Piutang Daerah (*Revolving*).

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari beberapa unsur yakni Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan.

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan dalam menentukan pembiayaan daerah merupakan dampak dari kebijakan dalam menentukan target Pendapatan dan alokasi kebutuhan belanja daerah. Sesuai dengan kondisi dan arah kebijakan yang ditentukan dari kedua komponen tersebut maka arah dan kebijakan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui :

1. Defisit yang terjadi tidak boleh melampaui sebesar 3 % dari Product Domestic Regional Bruto (PDRB) sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD serta jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Surplus/Defisit yang terjadi akan dilakukan kebijakan yang lebih memfokuskan pada pembiayaan intern guna menghindari beban yang berkelanjutan dimasa mendatang.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada tahun berjalan harus nol karena habis digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun berkenan.

STRATEGI PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan alokasi kebijakan keuangan sebagai implikasi dari rencana penerimaan Pendapatan dan rencana kebutuhan Belanja Daerah. Dengan fiskal daerah yang defisit, maka kebijakan pembiayaan menentukan terhadap bagaimana pemerintah daerah menutup defisit tersebut dalam suatu kebijakan pembiayaan.

Dengan memperhatikan komposisi kebijakan keuangan daerah tersebut, maka rincian pembiayaan daerah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel IV.1
Pembiayaan daerah setelah perubahan

Uraian	Sebelum	Sesudah	Perubahan	%
Penerimaan Pembiayaan				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	49.362.685.300,00	46.779.487.247,25	(2.583.198.052,75)	-5,23%
Pencaliran Dana Cadangan	0,00	10.363.000.000,00	10.363.000.000,00	100 %
Penerimaan Plutang Daerah	24.857.124.600,00	24.834.601.600,00	(22.523.000,00)	-0,09 %
Jumlah penerimaan pembiayaan	74.219.809.900,00	81.977.088.847,25	7.757.278.947,25	10,45 %
Pengeluaran Pembiayaan				
Penyertaan modal (Investasi) daerah	28.100.000.000,00	28.100.000.000,00	0,00	0,00%
Pembayaran pokok utang	41.583.200,00	41.583.200,00	0,00	0,00%
Jumlah pengeluaran pembiayaan	28.141.583.200,00	28.141.583.200,00	0,00	0,00%
Pembiayaan netto	46.078.226.700,00	53.835.505.647,25	7.757.278.947,25	10,45 %
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	354.364.151,00	0,00	(354.364.151,00)	-100,00%

Dalam Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 mengalami defisit sebesar *53 milyar 835 juta 505 ribu 647 rupiah 25 sen*. Sebagai penyeimbang dari defisit yang terjadi, maka Kebijakan Pembiayaan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan secara keseluruhan setelah perubahan dialokasikan sebesar *81 milyar 977 juta 088 ribu 847 rupiah 25 sen* atau naik sebesar 10,45 persen. Kenaikan tersebut berasal dari :

1. **Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu** yang ditetapkan sebesar *46 milyar 779 juta 487 ribu 247 rupiah 25 sen* sehingga mengalami penurunan sebesar 2 milyar 583 juta 198 ribu 52 rupiah 75 sen atau 5,23 persen. Penurunan disesuaikan dengan penetapan SILPA Tahun 2008.
2. **Pencairan Dana Cadangan** dalam perubahan ini dilakukan penarikan dana cadangan dari dana yang telah dicadangkan sebesar *10 milyar 363 juta rupiah* selama tahun *anggaran 2007 dan 2008*. Pencairan dana cadangan ini dilakukan dengan mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang pembentukan dana cadangan.
3. **Penerimaan Piutang Daerah** dialokasikan sebesar *24 milyar 834 juta 601 ribu 600 rupiah* sehingga mengalami *penurunan* sebesar 0,09 persen. Penurunan disesuaikan dengan skedul pengembalian pinjaman dana-dana yang bersifat revolving.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam perubahan ini dialokasikan sebesar *28 milyar 141 juta 583 ribu 200 rupiah* sehingga tidak mengalami perubahan.

Dari kondisi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan, Pembiayaan Netto didapat sebesar *53 milyar 835 juta 505 ribu 647 rupiah 25 sen*, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar *53 milyar 835 juta 505 ribu 647 rupiah 25 sen* sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan menjadi NOL.

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 disamping berpedoman pada Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas Pembangunan Tahun 2009, maka dalam menentukan kebijakan fiskal daerah memperhatikan pula kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, kondisi ekonomi makro dan dengan melihat perkembangan serta dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang.

Kita menyadari bahwa penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 menghadapi kapasitas fiskal yang kurang menggembirakan, disisi lain kita dihadapkan sejumlah kebijakan yang harus dilaksanakan di tahun 2009 ini.

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2009 secara garis besar menganut sistem anggaran kinerja dengan komposisi sebagai berikut : (i) Pendapatan Daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp. 968.705.872.062,00, (ii) Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 1.022.541.377.709,25 sehingga terjadi (iii) defisit anggaran sebesar Rp. 53.835.505.647,25

Desifit tersebut akan dibiayai dari sumber penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan secara keseluruhan setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp. 81.977.088.847,25 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar

Rp. 28.141.583.200,00 sehingga pembiayaan netto sebesar Rp. 53.835.505.647,25 .

Dari kondisi defisit anggaran sebesar Rp. 53.835.505.647,25 mampu ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp. 53.835.505.647,25 . maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun berjalan menjadi nol.